Jurnal Kebijakan Pemerintahan 9 (1) (2026): 36-54

JURNAL KEBIJAKAN PEMERINTAHAN

e-ISSN 2721-7051, p-ISSN 2599-3534

Website: http://ejournal/.ipdn.ac.id/JKP

Faculty of Political Government, Governance Institute of Home Affairs (IPDN)

DOI: https://doi.org/10.33701/jkp.v9i1.6114

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS KOMUNITAS: STUDI PROGRAM KANGPISMAN DI KECAMATAN SUMUR BANDUNG KOTA BANDUNG

Aty Susanti[1], Miswan[2], Tari Lukitasari[3]

[1]Educational Administration, Langlangbuana University
Jl. Karapitan No.116, Cikawao, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40261
[2]Public Administration, Al-Ghifari University
Jl. Cisaranten Kulon No.140, Cisaranten Kulon, Kec. Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat 40293
[3]Public Administration, Nurtanio University
Jl. Cassa No.2, Lanud Sulaiman, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40222

***coresponding author**

E-mail: aty.susanti@unla.ac.id

Abstract

This study examines the implementation of the KangPisMan (Reduce, Separate, Utilize) community-based waste management policy in Sumur Bandung District, Bandung City. The research aims to analyze the effectiveness of policy implementation and identify key factors influencing its performance within the local governance context. A qualitative descriptive approach with a phenomenological perspective was employed to explore the experiences and perceptions of stakeholders involved in the program. Data were collected through in-depth interviews, field observations, and document analysis, involving purposively selected informants, including local government officials, environmental task force members, and community activists. Data analysis followed the interactive model of Miles and Huberman, consisting of data reduction, data display, and conclusion drawing, with validity ensured through triangulation.The findings reveal that the KangPisMan policy has contributed to improving public awareness and encouraging initial behavioral changes in household waste management practices, particularly in waste sorting and reduction. However, the effectiveness of policy implementation remains constrained by several factors, including low community compliance, limited infrastructure and resources, and weak enforcement mechanisms. From a policy perspective, the results highlight the interaction between policy content and implementation context as critical determinants of success.This study concludes that while the regulatory framework is adequate, strengthening community engagement, enhancing institutional capacity, and ensuring consistent policy enforcement are essential to achieve sustainable urban waste management. The findings provide practical implications for improving community-based environmental governance in urban areas.

Keywords: *community-based waste management, KangPisMan policy, policy implementation, public policy, urban governance*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji implementasi kebijakan pengelolaan sampah berbasis masyarakat KangPisMan (Kurangi, Pisahkan, Manfaatkan) di Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi kebijakan serta mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang memengaruhi kinerjanya dalam konteks tata kelola lokal. Pendekatan deskriptif kualitatif dengan perspektif fenomenologis digunakan untuk mengeksplorasi pengalaman dan persepsi para pemangku kepentingan yang terlibat dalam program tersebut. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan analisis dokumen, yang melibatkan informan yang dipilih secara purposif, termasuk pejabat pemerintah daerah, anggota satuan tugas lingkungan, dan aktivis masyarakat. Analisis data mengikuti model interaktif Miles dan Huberman, yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan validitas yang dijamin melalui triangulasi.

Temuan menunjukkan bahwa kebijakan KangPisMan telah berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran publik dan mendorong perubahan perilaku awal dalam praktik pengelolaan sampah rumah tangga, khususnya dalam pemilahan dan pengurangan sampah. Namun, efektivitas implementasi kebijakan masih dibatasi oleh beberapa faktor, termasuk rendahnya kepatuhan masyarakat, keterbatasan infrastruktur dan sumber daya, serta mekanisme penegakan hukum yang lemah. Dari perspektif kebijakan, hasil penelitian ini menyoroti interaksi antara isi kebijakan dan konteks implementasi sebagai penentu keberhasilan yang kritis. Studi ini menyimpulkan bahwa meskipun kerangka regulasi sudah memadai, penguatan keterlibatan masyarakat, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan penegakan kebijakan yang konsisten merupakan hal-hal yang esensial untuk mewujudkan pengelolaan sampah perkotaan yang berkelanjutan. Temuan-temuan ini memberikan implikasi praktis bagi peningkatan tata kelola lingkungan berbasis masyarakat di kawasan perkotaan.

Kata Kunci: pengelolaan sampah berbasis masyarakat, kebijakan KangPisMan, implementasi kebijakan, kebijakan publik, tata kelola perkotaan.

I. PENDAHULUAN

Permasalahan pengelolaan sampah merupakan salah satu isu lingkungan yang semakin kompleks di berbagai kota besar di dunia, termasuk di Indonesia. Pertumbuhan penduduk, urbanisasi, serta perubahan pola konsumsi masyarakat menyebabkan peningkatan signifikan volume sampah yang dihasilkan setiap hari. World Bank memperkirakan bahwa lebih dari 2 miliar ton sampah dihasilkan secara global setiap tahunnya, dan jumlah tersebut diperkirakan terus meningkat seiring dengan perkembangan aktivitas ekonomi dan urbanisasi. Kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan pengelolaan sampah yang efektif, berkelanjutan, serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengelolaannya (Brotosusilo & Nabila, 2020). Dalam kajian administrasi publik, implementasi kebijakan dipahami sebagai proses yang kompleks yang melibatkan interaksi antara aktor, institusi, serta konteks sosial yang mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan (Sabatier & Weible, 2018). Di Indonesia, permasalahan sampah perkotaan menjadi tantangan serius bagi pemerintah daerah. Salah satu kota yang menghadapi persoalan tersebut adalah Kota Bandung. Tingginya volume sampah yang mencapai sekitar 1.600 ton per hari menimbulkan berbagai dampak lingkungan yang signifikan, seperti pencemaran lingkungan, banjir akibat penyumbatan saluran air, serta penurunan kualitas kesehatan masyarakat. Pengalaman tragedi longsor sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Leuwigajah yang menimbulkan korban jiwa juga menjadi pengingat penting mengenai urgensi pengelolaan sampah yang lebih sistematis dan berkelanjutan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sampah tidak dapat hanya mengandalkan sistem pengangkutan dan pembuangan akhir, tetapi perlu dimulai dari pengurangan sampah di sumbernya melalui keterlibatan masyarakat.

Sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Bandung meluncurkan program KangPisMan (Kurangi, Pisahkan, Manfaatkan) pada tahun 2018. Program ini merupakan strategi pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang bertujuan untuk mengurangi timbulan sampah melalui pembatasan penggunaan plastik, pemilahan sampah dari sumbernya, serta pemanfaatan kembali sampah yang masih memiliki nilai guna secara berkelanjutan.. Implementasi program ini didukung oleh kebijakan daerah seperti Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah serta Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1426 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah berupaya mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam mengelola sampah secara lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Meskipun berbagai kebijakan dan program telah diluncurkan, implementasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat masih menghadapi berbagai tantangan di

tingkat lokal. Salah satu wilayah yang menunjukkan dinamika tersebut adalah Kecamatan Sumur Bandung. Wilayah ini merupakan kawasan pusat kota dengan tingkat kepadatan penduduk yang relatif tinggi serta aktivitas ekonomi yang cukup intensif. Kondisi tersebut berkontribusi terhadap meningkatnya volume sampah yang dihasilkan oleh masyarakat. Berdasarkan laporan program KangPisMan tahun 2019, sebagian masyarakat di Kecamatan Sumur Bandung telah melakukan berbagai praktik pengelolaan sampah seperti membawa kantong belanja sendiri, memisahkan sampah rumah tangga, serta menabung sampah melalui bank sampah. Namun demikian, tingkat kepatuhan masyarakat dalam melakukan pemilahan sampah secara konsisten masih belum optimal, dan masih ditemukan praktik pembuangan sampah secara sembarangan di ruang publik maupun di bantaran sungai.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh berbagai faktor lain seperti tingkat kesadaran masyarakat, ketersediaan sumber daya, serta dukungan kelembagaan dalam pelaksanaan program. Dalam perspektif administrasi publik, keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh interaksi antara isi kebijakan (content of policy) dan konteks implementasi (context of implementation) sebagaimana dikemukakan oleh Grindle (1980). Kedua faktor tersebut menentukan sejauh mana kebijakan yang telah dirumuskan dapat diterjemahkan secara efektif ke dalam praktik di lapangan.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji pengelolaan sampah berbasis masyarakat dan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di berbagai daerah. Sekarningrum, Suparyogi, dan Yunita (2020) menunjukkan bahwa sosialisasi dan edukasi program KangPisMan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah dari sumbernya. Sementara itu, Yuanita dan Keban (2020) menemukan bahwa efektivitas program KangPisMan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti komitmen pemerintah, ketersediaan sarana dan prasarana, serta persepsi masyarakat terhadap program tersebut. Penelitian lain yang dilakukan oleh Yulistia, Suryaningsih, dan Rostyaningsih menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah seringkali menghadapi kendala dalam aspek komunikasi kebijakan, ketersediaan sumber daya, serta koordinasi antar lembaga pelaksana.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi Program KangPisMan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat, efektivitas pengelolaan sampah, serta partisipasi masyarakat dalam pengurangan sampah dari sumbernya. Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih berorientasi pada evaluasi keberhasilan program, tingkat partisipasi masyarakat, maupun faktor-faktor umum yang memengaruhi implementasi kebijakan. Penelitian-penelitian tersebut belum banyak mengkaji secara mendalam bagaimana interaksi antara **isi kebijakan (content of policy)** dan **konteks implementasi (context of implementation)** memengaruhi keberhasilan implementasi Program KangPisMan pada tingkat kecamatan sebagai unit pemerintahan yang berhadapan langsung dengan masyarakat.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan penelitian tersebut dengan menganalisis implementasi Program KangPisMan di Kecamatan Sumur Bandung menggunakan perspektif implementasi kebijakan Grindle. Penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi keberhasilan maupun hambatan implementasi program, tetapi juga menjelaskan bagaimana karakteristik isi kebijakan serta konteks implementasi saling berinteraksi dalam menentukan efektivitas pelaksanaan kebijakan di tingkat lokal. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi empiris terhadap pengembangan kajian implementasi kebijakan publik, khususnya pada pengelolaan sampah berbasis masyarakat di kawasan perkotaan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memfokuskan kajian pada implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui program KangPisMan di Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung. Penelitian ini

penting dilakukan untuk memahami bagaimana kebijakan tersebut dijalankan di tingkat lokal, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasinya, serta bagaimana strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui program KangPisMan di Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung serta mengidentifikasi berbagai tantangan dan solusi dalam pelaksanaannya guna mendukung pengelolaan lingkungan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui program KangPisMan di Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali makna, persepsi, serta dinamika sosial yang terjadi dalam proses pelaksanaan kebijakan di tingkat lokal.

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kualitatif dengan desain studi kasus**. Desain studi kasus dipilih karena penelitian bertujuan memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui Program KangPisMan pada konteks spesifik Kecamatan Sumur Bandung sebagai satuan analisis penelitian. Melalui desain ini, peneliti dapat mengkaji secara komprehensif interaksi antara isi kebijakan (*content of policy*) dan konteks implementasi (*context of implementation*) sebagaimana dikemukakan Grindle (1980) dalam situasi nyata implementasi kebijakan..

Informan penelitian terdiri dari 7 orang yang dipilih secara purposive berdasarkan keterlibatan langsung dalam implementasi program KangPisMan di Kecamatan Sumur Bandung. Informan penelitian meliputi Camat Sumur Bandung, aparat kelurahan di wilayah Kecamatan Sumur Bandung, anggota TNI yang tergabung dalam Satgas Citarum Harum, serta tokoh masyarakat dan pegiat lingkungan yang aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah. Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling, yaitu dengan memilih informan yang dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, serta keterlibatan langsung dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai pengalaman, persepsi, dan pandangan para informan terkait implementasi program KangPisMan. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung aktivitas pengelolaan sampah di masyarakat, termasuk kegiatan pemilahan sampah rumah tangga dan pengumpulan sampah oleh petugas kebersihan. Selain itu, dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang relevan seperti laporan program KangPisMan, dokumen kebijakan, serta peraturan terkait pengelolaan sampah.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahapan utama yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Proses analisis dilakukan secara terus-menerus sejak pengumpulan data hingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui program KangPisMan.

Untuk memastikan validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yaitu dengan membandingkan berbagai sumber data dan metode pengumpulan data yang berbeda. Triangulasi dilakukan melalui perbandingan antara hasil wawancara, observasi lapangan, dan dokumen kebijakan yang relevan sehingga data yang diperoleh dapat diuji tingkat keabsahannya dan menghasilkan temuan penelitian yang lebih kredibel.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui **Program KangPisMan** (Kurangi, Pisahkan, Manfaatkan) di Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, dengan menggunakan perspektif implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Grindle. Analisis difokuskan pada dua dimensi utama, yaitu isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation). Kedua dimensi tersebut digunakan untuk mengidentifikasi sejauh mana Program KangPisMan telah diimplementasikan serta faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaannya di tingkat kecamatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program KangPisMan telah memberikan perubahan positif dalam mendorong partisipasi masyarakat pada pengelolaan sampah berbasis sumber. Berbagai upaya, seperti sosialisasi, pembentukan bank sampah, edukasi lingkungan, serta keterlibatan pemerintah kewilayahan dan komunitas lingkungan telah mendukung pelaksanaan program. Namun demikian, implementasi kebijakan belum sepenuhnya berjalan optimal karena masih dijumpai beberapa kendala, antara lain rendahnya konsistensi masyarakat dalam melakukan pemilahan sampah dari rumah tangga, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, belum optimalnya koordinasi antarpemangku kepentingan, serta lemahnya penegakan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan sampah.

Temuan tersebut diperoleh melalui analisis terhadap data hasil wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi yang kemudian diinterpretasikan menggunakan kerangka implementasi kebijakan Grindle. Penyajian hasil penelitian tidak hanya mendeskripsikan kondisi empiris di lapangan, tetapi juga mengaitkannya dengan konsep teoritis serta membandingkannya dengan hasil penelitian terdahulu sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai implementasi Program KangPisMan di Kecamatan Sumur Bandung.

Berdasarkan kerangka implementasi kebijakan Grindle, hasil penelitian disajikan ke dalam dua dimensi utama, yaitu *content of policy* dan *context of implementation*. Pembahasan setiap dimensi dilakukan berdasarkan temuan empiris yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian diinterpretasikan menggunakan perspektif implementasi kebijakan.

3.1. *Content of Policy*

Dimensi *content of policy* digunakan untuk menganalisis sejauh mana substansi kebijakan mendukung implementasi Program KangPisMan di Kecamatan Sumur Bandung. Berdasarkan kerangka implementasi kebijakan Grindle, dimensi ini meliputi enam indikator, yaitu kepentingan kelompok sasaran, manfaat kebijakan, perubahan yang diinginkan, ketepatan program, pelaksana program, dan dukungan sumber daya. Analisis terhadap keenam indikator tersebut dilakukan berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan para informan, observasi lapangan, dan studi dokumentasi untuk memperoleh gambaran mengenai implementasi kebijakan secara empiris.

3.1.1 Kepentingan Kelompok Sasaran

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepentingan kelompok sasaran telah menjadi perhatian utama dalam implementasi Program KangPisMan di Kecamatan Sumur Bandung. Program ini dirancang untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat melalui pengurangan sampah dari sumbernya, pemilahan sampah rumah tangga, serta pemanfaatan kembali sampah yang masih memiliki nilai guna. Implementasi program tidak hanya berorientasi pada penyelesaian persoalan persampahan, tetapi juga diarahkan untuk membangun partisipasi masyarakat sebagai aktor utama dalam pengelolaan lingkungan.

Berdasarkan hasil wawancara, seluruh informan menyatakan bahwa masyarakat merupakan sasaran utama kebijakan sehingga berbagai bentuk edukasi dan pendampingan terus dilakukan oleh pemerintah kecamatan, kelurahan, serta berbagai komunitas

lingkungan. Komandan Satgas Citarum Harum menjelaskan bahwa beberapa wilayah, seperti RW 07 Kelurahan Kebon Pisang, telah menunjukkan keberhasilan dalam menerapkan prinsip KangPisMan. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan oleh aparat kewilayahan serta keterlibatan aktif masyarakat dalam kegiatan pengelolaan sampah.

Temuan tersebut diperkuat oleh keterangan Lurah Kebon Pisang yang menjelaskan bahwa implementasi Program KangPisMan dilakukan melalui berbagai kegiatan edukasi, salah satunya *Door to Door Education* (DTDE) yang melibatkan kader PKK dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya pemilahan sampah sejak dari rumah tangga. Strategi ini dinilai lebih efektif karena memberikan pendampingan secara langsung kepada masyarakat serta mampu meningkatkan kesadaran warga dalam mengubah perilaku pengelolaan sampah.

Namun demikian, implementasi kebijakan belum berlangsung secara merata di seluruh wilayah Kecamatan Sumur Bandung. Hasil wawancara dengan Lurah Braga dan Lurah Babakan Ciamis menunjukkan bahwa meskipun program telah berjalan dan beberapa bank sampah telah terbentuk, sebagian masyarakat masih belum konsisten melakukan pemilahan sampah dari sumbernya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perubahan perilaku masyarakat masih menjadi tantangan utama dalam implementasi Program KangPisMan.

Temuan tersebut juga dikonfirmasi oleh Camat Sumur Bandung yang menyatakan bahwa persoalan utama implementasi kebijakan bukan terletak pada substansi kebijakan, melainkan pada budaya masyarakat yang masih menganggap pengelolaan sampah sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemerintah setelah membayar iuran kebersihan. Oleh karena itu, pembentukan budaya pengelolaan sampah memerlukan proses edukasi yang berkelanjutan serta keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.

Berdasarkan perspektif Grindle, temuan tersebut menunjukkan bahwa kepentingan kelompok sasaran telah terakomodasi dalam substansi Program KangPisMan melalui berbagai strategi pemberdayaan masyarakat. Akan tetapi, efektivitas implementasi kebijakan masih dipengaruhi oleh tingkat penerimaan dan partisipasi masyarakat sebagai kelompok sasaran. Dengan demikian, keberhasilan implementasi tidak hanya ditentukan oleh kejelasan tujuan kebijakan, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah membangun kesadaran kolektif masyarakat dalam mengubah perilaku pengelolaan sampah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan sampah sangat bergantung pada tingkat partisipasi masyarakat dan keberlanjutan proses edukasi. Namun demikian, penelitian ini memberikan temuan empiris bahwa pendekatan berbasis kewilayahan melalui keterlibatan camat, lurah, kader PKK, dan komunitas lingkungan menjadi faktor penting dalam memperkuat implementasi Program KangPisMan di tingkat lokal. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya dipengaruhi oleh substansi kebijakan, tetapi juga oleh intensitas pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan kepada masyarakat.

3.1.2 Jenis Manfaat yang Dihasilkan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program KangPisMan memberikan manfaat yang dirasakan secara langsung maupun tidak langsung oleh masyarakat Kecamatan Sumur Bandung. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, manfaat program dapat dikelompokkan ke dalam tiga aspek utama, yaitu manfaat lingkungan, manfaat ekonomi, dan manfaat sosial melalui perubahan perilaku masyarakat.

Manfaat pertama yang paling banyak dirasakan adalah meningkatnya kualitas lingkungan. Seluruh informan menyatakan bahwa penerapan prinsip *Kurangi, Pisahkan, dan Manfaatkan* telah mendorong lingkungan permukiman menjadi lebih bersih, sehat, dan nyaman. Komandan Satgas Citarum Harum

menjelaskan bahwa pengurangan sampah dari sumbernya mampu menekan volume sampah yang harus diangkut ke tempat pembuangan akhir, sekaligus mengurangi potensi pencemaran lingkungan. Sampah organik mulai dimanfaatkan menjadi kompos, sedangkan sampah anorganik dipilah untuk didaur ulang atau disalurkan melalui bank sampah.

Temuan tersebut diperkuat oleh Camat Sumur Bandung yang menegaskan bahwa manfaat utama Program KangPisMan bukan hanya terciptanya lingkungan yang lebih bersih, tetapi juga meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat akibat berkurangnya penumpukan sampah. Selain itu, pengelolaan sampah berbasis sumber dinilai mampu mendukung upaya pelestarian lingkungan melalui pengurangan pencemaran dan pemanfaatan kembali sumber daya yang masih memiliki nilai guna.

Selain manfaat lingkungan, penelitian ini menemukan bahwa Program KangPisMan juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Informan dari Kelurahan Babakan Ciamis menjelaskan bahwa keberadaan bank sampah telah membuka peluang bagi masyarakat untuk memperoleh pendapatan tambahan melalui penjualan sampah anorganik yang telah dipilah. Beberapa warga bahkan telah memanfaatkan hasil pengelolaan sampah untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga, sementara sampah organik diolah menjadi pupuk yang dapat dimanfaatkan kembali maupun memiliki nilai jual. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sampah tidak lagi dipandang sebagai limbah semata, tetapi sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomi apabila dikelola secara tepat.

Manfaat berikutnya adalah terjadinya perubahan perilaku masyarakat dalam memandang pengelolaan sampah. Berdasarkan hasil wawancara, para informan menyatakan bahwa masyarakat mulai memahami pentingnya memilah sampah sejak dari rumah tangga serta memanfaatkan kembali sampah yang masih memiliki nilai guna. Meskipun perubahan tersebut belum merata pada seluruh wilayah, berbagai kegiatan sosialisasi dan pendampingan telah mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk lebih bertanggung jawab terhadap pengelolaan sampah di lingkungan masing-masing. Dengan demikian, Program KangPisMan tidak hanya berorientasi pada pengurangan timbulan sampah, tetapi juga pada pembentukan budaya masyarakat yang lebih peduli terhadap kelestarian lingkungan.

Di sisi lain, penelitian juga menemukan bahwa manfaat program belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat beberapa kendala implementasi. Pegiat lingkungan mengemukakan bahwa keterbatasan sumber daya manusia, belum memadainya sarana dan prasarana pengelolaan sampah, serta rendahnya insentif bagi petugas kebersihan menjadi faktor yang menghambat optimalisasi manfaat Program KangPisMan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh substansi program, tetapi juga oleh dukungan sumber daya yang memadai dan komitmen pemerintah dalam memperkuat kapasitas pelaksana kebijakan.

Berdasarkan perspektif Grindle, temuan tersebut menunjukkan bahwa manfaat kebijakan telah dirasakan oleh kelompok sasaran sesuai dengan tujuan Program KangPisMan, yaitu meningkatkan kualitas lingkungan, mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta membangun budaya pengelolaan sampah berbasis sumber. Namun demikian, manfaat tersebut belum dirasakan secara optimal oleh seluruh masyarakat karena masih dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya dan kapasitas implementasi di tingkat lokal.

Hasil penelitian ini memperkuat temuan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa kebijakan pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat mampu menghasilkan manfaat lingkungan dan ekonomi apabila didukung oleh keterlibatan masyarakat secara aktif. Akan tetapi, penelitian ini memberikan kontribusi empiris bahwa optimalisasi manfaat Program KangPisMan tidak hanya memerlukan partisipasi masyarakat, tetapi juga membutuhkan penguatan kapasitas kelembagaan, penyediaan sarana pendukung, dan keberlanjutan pembinaan oleh pemerintah kewilayahan. Temuan ini memperluas

pemahaman mengenai implementasi kebijakan pengelolaan sampah pada tingkat lokal dengan menunjukkan bahwa manfaat kebijakan sangat dipengaruhi oleh interaksi antara substansi kebijakan dan kapasitas implementasi di lapangan.

3.1.3 Perubahan yang Diinginkan

Salah satu tujuan utama implementasi Program KangPisMan adalah mendorong perubahan paradigma masyarakat dalam pengelolaan sampah, yaitu dari pola konvensional *kumpul–angkut–buang* menuju pengelolaan sampah berbasis sumber melalui kegiatan mengurangi, memilah, dan memanfaatkan kembali sampah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan tersebut mulai terlihat pada sebagian masyarakat di Kecamatan Sumur Bandung, meskipun tingkat keberhasilannya masih bervariasi antarwilayah.

Berdasarkan hasil wawancara, seluruh informan memiliki pandangan yang relatif sama bahwa keberhasilan Program KangPisMan tidak hanya diukur dari berkurangnya volume sampah, tetapi terutama dari perubahan perilaku masyarakat dalam memperlakukan sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai lingkungan maupun ekonomi. Komandan Satgas Citarum Harum menjelaskan bahwa masyarakat mulai diarahkan untuk mengurangi produksi sampah sejak dari rumah tangga melalui pemilahan dan pemanfaatan sampah sesuai prinsip 3R (*reduce, reuse,* dan *recycle*). Kondisi tersebut menunjukkan adanya pergeseran orientasi kebijakan dari pengelolaan sampah di hilir menuju pengelolaan berbasis sumber.

Temuan tersebut diperkuat oleh para lurah di wilayah Kecamatan Sumur Bandung yang menyatakan bahwa perubahan yang diharapkan bukan sekadar meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap program pemerintah, tetapi terbentuknya budaya baru dalam pengelolaan sampah. Masyarakat didorong untuk membiasakan pemilahan sampah sejak dari rumah tangga sehingga volume sampah yang dikirim ke tempat pembuangan akhir dapat dikurangi secara bertahap. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa perubahan perilaku tersebut belum berlangsung secara merata karena masih terdapat masyarakat yang belum memiliki kesadaran untuk melakukan pemilahan sampah secara konsisten.

Informan kunci, yaitu Camat Sumur Bandung, menegaskan bahwa perubahan perilaku masyarakat merupakan tantangan terbesar dalam implementasi Program KangPisMan. Menurut beliau, keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada kemampuan seluruh pemangku kepentingan dalam membangun budaya peduli lingkungan melalui edukasi yang berkelanjutan. Meskipun pemerintah telah menyediakan berbagai program pendukung, masih terdapat masyarakat, khususnya yang berada di kawasan bantaran sungai, yang mempertahankan kebiasaan membuang sampah secara sembarangan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perubahan perilaku memerlukan proses yang panjang dan tidak dapat dicapai hanya melalui penyediaan regulasi atau sarana pendukung semata.

Selain faktor budaya masyarakat, penelitian juga menemukan bahwa keberhasilan perubahan perilaku dipengaruhi oleh kondisi lingkungan sosial dan dukungan infrastruktur. Pegiat lingkungan mengemukakan bahwa penyediaan tempat sampah, penataan kawasan bantaran sungai, serta kegiatan edukasi dan aksi bersih lingkungan secara berkala merupakan strategi yang efektif untuk mempercepat perubahan perilaku masyarakat. Dengan demikian, perubahan yang diinginkan dalam Program KangPisMan tidak hanya berkaitan dengan aspek individual, tetapi juga memerlukan dukungan lingkungan yang mampu memperkuat kebiasaan masyarakat dalam mengelola sampah secara berkelanjutan.

Dalam perspektif implementasi kebijakan Grindle, temuan tersebut menunjukkan bahwa perubahan yang diharapkan (*extent of change envisioned*) telah dirumuskan secara jelas dalam substansi Program KangPisMan, yaitu membangun perubahan perilaku masyarakat melalui pengelolaan sampah berbasis sumber. Akan tetapi, tingkat perubahan yang diharapkan masih menghadapi berbagai hambatan, terutama terkait budaya masyarakat, konsistensi partisipasi warga, dan

keterbatasan dukungan lingkungan implementasi. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan sosial sebagai tujuan kebijakan memerlukan proses implementasi yang berkelanjutan serta kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan.

Hasil penelitian ini memperkuat berbagai penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa perubahan perilaku masyarakat merupakan indikator utama keberhasilan kebijakan pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat. Namun demikian, penelitian ini memberikan kontribusi empiris yang berbeda dengan menunjukkan bahwa perubahan perilaku tidak hanya dipengaruhi oleh intensitas sosialisasi, tetapi juga oleh budaya masyarakat, karakteristik wilayah, serta dukungan kelembagaan di tingkat kecamatan dan kelurahan. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah memerlukan pendekatan yang bersifat adaptif sesuai dengan kondisi sosial masyarakat pada masing-masing wilayah.

3.1.4 Letak Pengambilan Keputusan (*Site of Decision Making*)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program KangPisMan di Kecamatan Sumur Bandung menerapkan mekanisme pengambilan keputusan yang bersifat kolaboratif dan berjenjang. Meskipun arah kebijakan ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Lingkungan Hidup, implementasi operasional di tingkat kecamatan dan kelurahan memberikan ruang bagi pemerintah kewilayahan untuk menyesuaikan strategi pelaksanaan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat setempat. Dengan demikian, pengambilan keputusan tidak sepenuhnya bersifat sentralistik, tetapi melibatkan koordinasi antarpemangku kepentingan dalam setiap tahapan implementasi kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara, Camat Sumur Bandung menjelaskan bahwa pemerintah kecamatan berperan sebagai koordinator dalam mengintegrasikan kebijakan pemerintah kota dengan pelaksanaan di tingkat kelurahan dan masyarakat. Setiap keputusan strategis yang berkaitan dengan pelaksanaan Program KangPisMan, seperti penentuan lokasi prioritas, pelaksanaan kegiatan sosialisasi, pembentukan bank sampah, serta pelibatan komunitas lingkungan, dilakukan melalui koordinasi antara pemerintah kecamatan, kelurahan, Dinas Lingkungan Hidup, Satgas Citarum Harum, dan unsur masyarakat. Mekanisme tersebut memungkinkan implementasi program lebih responsif terhadap kondisi lapangan sekaligus memperkuat sinergi antarlembaga.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa pemerintah kelurahan memiliki ruang diskresi dalam menentukan pendekatan implementasi sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing. Beberapa kelurahan mengembangkan strategi *Door to Door Education* (DTDE), sedangkan wilayah lain lebih menitikberatkan pada penguatan bank sampah atau kegiatan kerja bakti lingkungan. Fleksibilitas tersebut menunjukkan bahwa implementasi Program KangPisMan tidak dilakukan secara seragam, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan, tingkat partisipasi masyarakat, dan kapasitas kelembagaan pada masing-masing wilayah.

Di sisi lain, penelitian juga menemukan bahwa koordinasi lintas sektor masih menghadapi beberapa kendala. Perbedaan kapasitas sumber daya antarwilayah, keterbatasan dukungan anggaran, serta belum optimalnya sinkronisasi antarinstansi menyebabkan beberapa keputusan implementasi tidak dapat dijalankan secara merata. Kondisi tersebut mengakibatkan variasi capaian implementasi Program KangPisMan antarwilayah di Kecamatan Sumur Bandung.

Dalam perspektif Grindle, temuan tersebut menunjukkan bahwa **letak pengambilan keputusan (site of decision making)** memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Meskipun arah kebijakan ditentukan pada tingkat pemerintah kota, efektivitas implementasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah kecamatan dan kelurahan dalam menerjemahkan kebijakan ke dalam berbagai program operasional yang

sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan kata lain, keberhasilan implementasi tidak hanya ditentukan oleh kejelasan kebijakan di tingkat pusat, tetapi juga oleh kapasitas aktor lokal dalam mengambil keputusan yang adaptif terhadap kondisi wilayahnya.

Hasil penelitian ini memberikan kontribusi empiris bahwa pola pengambilan keputusan yang bersifat kolaboratif mampu meningkatkan fleksibilitas implementasi Program KangPisMan. Namun demikian, efektivitas pola tersebut tetap memerlukan koordinasi yang kuat, kejelasan pembagian kewenangan, serta dukungan sumber daya yang memadai agar setiap keputusan yang dihasilkan dapat diimplementasikan secara konsisten pada seluruh wilayah sasaran. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh hubungan yang sinergis antara pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan di tingkat lokal.

3.1.5 Pelaksana Program (*Program Implementers*)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program KangPisMan di Kecamatan Sumur Bandung melibatkan berbagai aktor yang memiliki peran saling melengkapi, mulai dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung, pemerintah kecamatan, pemerintah kelurahan, Satgas Citarum Harum, kader PKK, pengelola bank sampah, hingga masyarakat sebagai pelaksana utama pengelolaan sampah berbasis sumber. Keterlibatan berbagai aktor tersebut menunjukkan bahwa implementasi Program KangPisMan menerapkan pendekatan kolaboratif yang menempatkan pemerintah dan masyarakat sebagai mitra dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Berdasarkan hasil wawancara, Camat Sumur Bandung menjelaskan bahwa pemerintah kecamatan berperan sebagai koordinator yang menghubungkan kebijakan pemerintah kota dengan pelaksanaan di tingkat kelurahan. Pemerintah kecamatan tidak hanya melakukan koordinasi, tetapi juga memfasilitasi kegiatan sosialisasi, pembinaan bank sampah, monitoring pelaksanaan program, serta memperkuat sinergi antarperangkat daerah dan unsur masyarakat. Peran koordinatif tersebut menjadi faktor penting dalam menjaga kesinambungan implementasi Program KangPisMan di seluruh wilayah kecamatan.

Pada tingkat kelurahan, implementasi program didukung oleh lurah, ketua RW, kader PKK, dan pengelola bank sampah yang secara langsung berinteraksi dengan masyarakat. Para pelaksana di tingkat kewilayahan berperan dalam memberikan edukasi, melakukan pendampingan, mengorganisasi kegiatan kerja bakti lingkungan, serta mendorong masyarakat untuk membiasakan pemilahan sampah sejak dari rumah tangga. Penelitian ini menunjukkan bahwa kedekatan aparatur kewilayahan dengan masyarakat menjadi salah satu faktor yang mempermudah proses implementasi kebijakan.

Meskipun demikian, hasil penelitian juga mengidentifikasi beberapa kendala yang dihadapi oleh para pelaksana program. Informan menyampaikan bahwa keterbatasan jumlah sumber daya manusia, tingginya beban tugas aparatur kewilayahan, serta belum meratanya kapasitas pengelola bank sampah menyebabkan intensitas pendampingan kepada masyarakat belum dapat dilakukan secara optimal. Selain itu, koordinasi lintas sektor masih bergantung pada komitmen masing-masing aktor sehingga efektivitas implementasi berbeda pada setiap wilayah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi tidak hanya ditentukan oleh banyaknya aktor yang terlibat, tetapi juga oleh kapasitas kelembagaan dan kualitas koordinasi antarpelaksana.

Hasil observasi lapangan memperlihatkan bahwa wilayah yang memiliki koordinasi lebih baik antara pemerintah kelurahan, kader PKK, komunitas lingkungan, dan pengelola bank sampah menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat yang lebih tinggi dibandingkan wilayah yang koordinasinya masih terbatas. Temuan ini mengindikasikan bahwa keberhasilan implementasi Program KangPisMan sangat dipengaruhi oleh kemampuan para pelaksana dalam membangun komunikasi, kolaborasi,

dan kepercayaan dengan masyarakat sebagai kelompok sasaran.

Dalam perspektif implementasi kebijakan Grindle, pelaksana program merupakan aktor yang berperan penting dalam menerjemahkan substansi kebijakan menjadi tindakan nyata di lapangan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa para pelaksana Program KangPisMan telah menjalankan fungsi koordinasi, edukasi, fasilitasi, dan pendampingan secara aktif. Namun demikian, efektivitas pelaksanaan program masih dipengaruhi oleh keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, variasi kemampuan kelembagaan, dan tingkat koordinasi antarorganisasi pelaksana.

Hasil penelitian ini memperkuat penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah memerlukan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan. Akan tetapi, penelitian ini memberikan temuan empiris yang lebih spesifik bahwa peran pemerintah kewilayahan, khususnya kecamatan dan kelurahan, menjadi faktor strategis dalam menjembatani kebijakan pemerintah kota dengan praktik implementasi di tingkat masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa kapasitas aktor lokal merupakan salah satu determinan utama keberhasilan implementasi Program KangPisMan di tingkat kecamatan.

3.1.6 Dukungan Sumber Daya (*Resources Committed*)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan sumber daya merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan implementasi Program KangPisMan di Kecamatan Sumur Bandung. Meskipun kebijakan telah memiliki landasan regulasi yang jelas dan didukung oleh komitmen pemerintah daerah, efektivitas implementasi masih dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, pendanaan, serta kapasitas kelembagaan pada tingkat pelaksana.

Berdasarkan hasil wawancara, seluruh informan menyampaikan bahwa pemerintah telah menyediakan berbagai bentuk dukungan, antara lain melalui kegiatan sosialisasi, pembentukan bank sampah, penyediaan sarana pemilahan sampah, serta pembinaan kepada masyarakat. Pemerintah kecamatan dan kelurahan juga secara aktif melakukan koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup, Satgas Citarum Harum, kader PKK, dan komunitas lingkungan untuk mendukung pelaksanaan Program KangPisMan. Dukungan tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah dalam mendorong implementasi kebijakan pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat.

Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa dukungan sumber daya yang tersedia belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan implementasi di lapangan. Beberapa informan mengemukakan bahwa jumlah petugas pendamping masih terbatas dibandingkan dengan luas wilayah pelayanan, sehingga kegiatan edukasi dan monitoring kepada masyarakat belum dapat dilakukan secara berkelanjutan. Selain itu, sarana pendukung seperti tempat sampah terpilah, fasilitas pengolahan sampah, serta peralatan operasional bank sampah masih belum tersedia secara merata di seluruh wilayah Kecamatan Sumur Bandung. Kondisi tersebut menyebabkan implementasi Program KangPisMan berkembang dengan tingkat keberhasilan yang berbeda pada masing-masing kelurahan.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa aspek pendanaan menjadi salah satu tantangan dalam menjaga keberlanjutan program. Meskipun berbagai kegiatan telah memperoleh dukungan dari pemerintah daerah, beberapa kegiatan pemberdayaan masyarakat masih bergantung pada partisipasi sukarela masyarakat maupun dukungan dari komunitas lingkungan. Akibatnya, intensitas kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan belum dapat dilaksanakan secara optimal dan berkesinambungan. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya memerlukan komitmen pemerintah, tetapi juga dukungan pembiayaan yang memadai agar seluruh komponen program dapat berjalan secara konsisten.

Selain keterbatasan sumber daya fisik dan finansial, penelitian ini menemukan bahwa kapasitas sumber daya manusia juga

menjadi faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan. Variasi kemampuan aparatur kewilayahan, pengelola bank sampah, serta kader lingkungan dalam melakukan edukasi dan pendampingan masyarakat menyebabkan efektivitas implementasi berbeda antarwilayah. Wilayah yang memiliki pelaksana dengan kapasitas koordinasi dan komunikasi yang baik cenderung menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat yang lebih tinggi dibandingkan wilayah yang masih menghadapi keterbatasan kapasitas pelaksana.

Dalam perspektif implementasi kebijakan Grindle, sumber daya merupakan prasyarat penting yang menentukan kemampuan pelaksana dalam menerjemahkan kebijakan menjadi tindakan nyata. Temuan penelitian menunjukkan bahwa substansi Program KangPisMan telah dirancang secara memadai, namun implementasinya belum sepenuhnya optimal karena masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, pendanaan, serta kapasitas kelembagaan. Dengan demikian, keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas kebijakan, tetapi juga oleh kesiapan sumber daya yang mendukung pelaksanaannya.

Hasil penelitian ini memperkuat berbagai penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa keterbatasan sumber daya merupakan salah satu hambatan utama dalam implementasi kebijakan publik. Akan tetapi, penelitian ini memberikan temuan empiris yang lebih spesifik bahwa persoalan sumber daya pada implementasi Program KangPisMan tidak hanya berkaitan dengan jumlah fasilitas atau besaran anggaran, tetapi juga menyangkut kapasitas kelembagaan, kualitas koordinasi, dan kemampuan aktor lokal dalam memobilisasi sumber daya yang tersedia. Temuan tersebut menunjukkan bahwa penguatan kapasitas kelembagaan di tingkat kecamatan dan kelurahan merupakan strategi yang sama pentingnya dengan penyediaan sumber daya fisik dalam meningkatkan keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan sampah.

3.2 Context of Implementation

Selain dipengaruhi oleh substansi kebijakan (*content of policy*), keberhasilan implementasi Program KangPisMan juga ditentukan oleh kondisi lingkungan implementasi (*context of implementation*). Menurut Grindle, implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada kualitas rancangan kebijakan, tetapi juga dipengaruhi oleh interaksi berbagai aktor, karakteristik kelembagaan, kapasitas organisasi pelaksana, serta respons kelompok sasaran terhadap kebijakan yang diimplementasikan. Oleh karena itu, analisis terhadap dimensi *context of implementation* menjadi penting untuk menjelaskan mengapa implementasi Program KangPisMan menunjukkan tingkat keberhasilan yang berbeda pada masing-masing wilayah di Kecamatan Sumur Bandung.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi lapangan, dan studi dokumentasi, penelitian ini menemukan bahwa implementasi Program KangPisMan dipengaruhi oleh tiga aspek utama, yaitu kekuatan dan strategi aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan, karakteristik kelembagaan yang mendukung pelaksanaan program, serta tingkat kepatuhan dan respons masyarakat sebagai kelompok sasaran. Ketiga aspek tersebut saling berinteraksi dalam menentukan efektivitas implementasi kebijakan pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Kecamatan Sumur Bandung.

3.2.2 Karakteristik Institusi dan Rezim (*Institution and Regime Characteristics*)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik kelembagaan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap implementasi Program KangPisMan di Kecamatan Sumur Bandung. Implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh substansi regulasi yang telah ditetapkan Pemerintah Kota Bandung, tetapi juga dipengaruhi oleh kapasitas organisasi pelaksana, pola koordinasi antarinstansi, komitmen pimpinan, serta budaya kerja yang berkembang pada setiap tingkat

pemerintahan. Perbedaan karakteristik kelembagaan tersebut menyebabkan efektivitas implementasi Program KangPisMan menunjukkan variasi antarwilayah meskipun berada dalam kerangka kebijakan yang sama.

Berdasarkan hasil wawancara, penelitian ini menemukan bahwa Pemerintah Kecamatan Sumur Bandung telah membangun mekanisme koordinasi yang melibatkan pemerintah kelurahan, Dinas Lingkungan Hidup, Satgas Citarum Harum, kader PKK, pengelola bank sampah, serta berbagai komunitas lingkungan. Koordinasi tersebut dilakukan melalui pertemuan rutin, kegiatan monitoring, sosialisasi, dan evaluasi pelaksanaan program sehingga setiap aktor memperoleh pemahaman yang relatif sama mengenai tujuan Program KangPisMan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya komitmen kelembagaan yang cukup kuat dalam mendukung implementasi kebijakan.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa kapasitas kelembagaan belum sepenuhnya merata pada seluruh wilayah. Beberapa kelurahan mampu mengembangkan inovasi melalui pembentukan bank sampah yang aktif, pelaksanaan *Door to Door Education* (DTDE), serta pemberdayaan kader lingkungan. Sebaliknya, pada wilayah lain implementasi masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, belum optimalnya koordinasi lintas sektor, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Temuan tersebut menunjukkan bahwa karakteristik organisasi pelaksana menjadi faktor penting yang memengaruhi variasi keberhasilan implementasi Program KangPisMan di tingkat lokal.

Penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa kepemimpinan pemerintah kewilayahan memiliki peran strategis dalam memperkuat kapasitas kelembagaan. Camat dan para lurah tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga berperan sebagai penggerak kolaborasi, fasilitator, dan motivator bagi masyarakat serta berbagai organisasi yang terlibat dalam pengelolaan sampah. Kepemimpinan yang adaptif tersebut mampu meningkatkan koordinasi antarlembaga, memperkuat komunikasi dengan masyarakat, serta mendorong munculnya berbagai inovasi lokal dalam implementasi Program KangPisMan. Sebaliknya, pada wilayah yang koordinasi kelembagaannya belum berjalan secara optimal, pelaksanaan program cenderung lebih bergantung pada inisiatif individu sehingga keberlanjutannya menjadi kurang terjamin.

Selain faktor kepemimpinan, penelitian ini menemukan bahwa budaya organisasi juga memengaruhi implementasi kebijakan. Organisasi yang memiliki budaya kolaboratif, terbuka terhadap partisipasi masyarakat, dan mampu membangun komunikasi lintas sektor menunjukkan tingkat keberhasilan implementasi yang lebih baik dibandingkan organisasi yang masih bekerja secara sektoral. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas implementasi kebijakan tidak hanya dipengaruhi oleh struktur organisasi, tetapi juga oleh nilai-nilai organisasi yang berkembang dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Dalam perspektif implementasi kebijakan Grindle, karakteristik institusi dan rezim mencerminkan kemampuan organisasi pelaksana dalam mengelola proses implementasi kebijakan secara efektif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program KangPisMan di Kecamatan Sumur Bandung telah didukung oleh struktur kelembagaan yang relatif jelas, namun efektivitas pelaksanaannya masih dipengaruhi oleh variasi kapasitas organisasi, kualitas koordinasi, kepemimpinan, serta budaya kerja pada masing-masing wilayah. Dengan demikian, keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada desain kelembagaan, tetapi juga pada kemampuan organisasi untuk beradaptasi terhadap dinamika sosial masyarakat.

Hasil penelitian ini memberikan kontribusi empiris dengan menunjukkan bahwa karakteristik kelembagaan merupakan salah satu determinan utama keberhasilan implementasi Program KangPisMan. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang lebih banyak menekankan pentingnya partisipasi masyarakat, penelitian ini menunjukkan bahwa kapasitas organisasi pelaksana dan kualitas kepemimpinan pemerintah

kewilayahan merupakan faktor yang menjembatani keberhasilan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Temuan ini memperluas pemahaman mengenai implementasi kebijakan pengelolaan sampah dengan menempatkan kelembagaan lokal sebagai faktor strategis dalam mencapai keberhasilan implementasi kebijakan publik.

3.2.3 Kepatuhan dan Respons Masyarakat (*Compliance and Responsiveness*)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan dan respons masyarakat merupakan faktor yang paling menentukan keberhasilan implementasi Program KangPisMan di Kecamatan Sumur Bandung. Meskipun berbagai bentuk sosialisasi, edukasi, dan pendampingan telah dilaksanakan secara berkelanjutan, kepatuhan masyarakat dalam menerapkan prinsip *Kurangi, Pisahkan, dan Manfaatkan* masih menunjukkan tingkat yang beragam pada setiap wilayah. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh tersedianya regulasi dan program pemerintah, tetapi juga oleh sejauh mana masyarakat bersedia menerima, memahami, dan menerapkan kebijakan dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar informan menyatakan bahwa masyarakat telah memiliki pemahaman mengenai tujuan Program KangPisMan, namun pemahaman tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh perubahan perilaku yang konsisten. Masih ditemukan masyarakat yang mencampur sampah organik dan anorganik, membuang sampah di luar waktu yang telah ditentukan, serta menganggap pengelolaan sampah sebagai tanggung jawab pemerintah setelah membayar iuran kebersihan. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tingkat pengetahuan masyarakat dan praktik pengelolaan sampah di lapangan.

Hasil observasi lapangan memperlihatkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat cenderung lebih tinggi pada wilayah yang memiliki kepemimpinan lokal yang aktif, keberadaan bank sampah yang berjalan secara konsisten, serta kegiatan edukasi yang dilakukan secara berkelanjutan. Sebaliknya, pada wilayah yang intensitas pembinaannya relatif rendah, partisipasi masyarakat dalam memilah dan memanfaatkan sampah juga cenderung menurun. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh kesadaran individu, tetapi juga oleh lingkungan sosial yang mendukung perubahan perilaku.

Penelitian ini juga menemukan bahwa respons masyarakat terhadap Program KangPisMan pada umumnya bersifat positif. Masyarakat mulai memahami manfaat ekonomi dan manfaat lingkungan dari pengelolaan sampah berbasis sumber, khususnya melalui kegiatan bank sampah dan pemanfaatan sampah organik menjadi kompos. Namun demikian, penelitian mengidentifikasi bahwa motivasi masyarakat masih didominasi oleh manfaat yang dirasakan secara langsung, sedangkan kesadaran terhadap pentingnya keberlanjutan lingkungan belum sepenuhnya menjadi budaya kolektif. Oleh karena itu, perubahan perilaku yang terjadi masih memerlukan proses penguatan melalui edukasi yang berkesinambungan.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa pendekatan persuasif yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan, kelurahan, kader PKK, Satgas Citarum Harum, serta komunitas lingkungan memberikan dampak yang lebih positif dibandingkan pendekatan yang hanya menekankan aspek pengawasan atau pemberian sanksi. Meskipun regulasi telah mengatur sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan sampah, implementasi di lapangan lebih banyak mengedepankan pembinaan dan edukasi sebagai strategi utama dalam membangun kepatuhan masyarakat. Pendekatan tersebut dinilai lebih sesuai dengan karakteristik sosial masyarakat Kecamatan Sumur Bandung yang membutuhkan proses adaptasi dalam membentuk kebiasaan baru terkait pengelolaan sampah.

Dalam perspektif implementasi kebijakan Grindle, tingkat kepatuhan dan respons kelompok sasaran merupakan

indikator yang mencerminkan efektivitas implementasi kebijakan secara keseluruhan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan Program KangPisMan belum sepenuhnya ditentukan oleh kualitas substansi kebijakan, tetapi lebih dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah dan para pemangku kepentingan dalam membangun kesadaran, kepercayaan, dan partisipasi masyarakat secara berkelanjutan. Dengan demikian, kepatuhan masyarakat merupakan hasil dari interaksi antara kualitas kebijakan, kapasitas kelembagaan, strategi implementasi, dan karakteristik sosial masyarakat sebagai kelompok sasaran.

Hasil penelitian ini memberikan kontribusi empiris yang berbeda dengan sebagian besar penelitian terdahulu yang cenderung menempatkan rendahnya kesadaran masyarakat sebagai penyebab utama belum optimalnya implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan masyarakat merupakan konsekuensi dari proses implementasi yang dipengaruhi oleh kualitas koordinasi kelembagaan, kepemimpinan pemerintah kewilayahan, intensitas edukasi, serta keberlanjutan pendampingan kepada masyarakat. Dengan demikian, peningkatan kepatuhan masyarakat tidak cukup dilakukan melalui sosialisasi semata, tetapi memerlukan penguatan tata kelola implementasi kebijakan secara menyeluruh agar perubahan perilaku masyarakat dapat berlangsung secara berkelanjutan.

3.3 Sintesis Hasil Penelitian

Berdasarkan analisis terhadap dimensi *content of policy* dan *context of implementation*, penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Program KangPisMan di Kecamatan Sumur Bandung pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan arah kebijakan Pemerintah Kota Bandung dalam mewujudkan pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Hal tersebut ditunjukkan oleh adanya kejelasan tujuan kebijakan, dukungan regulasi, keterlibatan berbagai aktor implementasi, serta terbentuknya berbagai program pemberdayaan masyarakat seperti bank sampah, kegiatan *Door to Door Education* (DTDE), sosialisasi lingkungan, dan penguatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis sumber.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas implementasi Program KangPisMan belum sepenuhnya optimal. Hambatan implementasi tidak terutama disebabkan oleh lemahnya substansi kebijakan, melainkan lebih banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berasal dari lingkungan implementasi. Keterbatasan kapasitas kelembagaan, variasi kemampuan organisasi pelaksana, belum optimalnya koordinasi lintas sektor, keterbatasan sumber daya, serta rendahnya konsistensi partisipasi masyarakat merupakan faktor-faktor yang secara bersama-sama memengaruhi pencapaian tujuan kebijakan.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi Program KangPisMan sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah kewilayahan dalam membangun kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah kecamatan berperan sebagai penghubung (*bridging actor*) yang mengintegrasikan kebijakan pemerintah kota dengan pelaksanaan di tingkat kelurahan dan masyarakat. Sementara itu, pemerintah kelurahan, kader PKK, Satgas Citarum Harum, pengelola bank sampah, dan komunitas lingkungan berperan sebagai aktor yang secara langsung membangun partisipasi masyarakat melalui edukasi, pendampingan, dan pemberdayaan masyarakat. Temuan tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah lebih efektif apabila didukung oleh tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*) yang melibatkan berbagai aktor sesuai dengan kapasitas dan kewenangannya.

Salah satu temuan penting penelitian ini adalah bahwa rendahnya kepatuhan masyarakat tidak dapat dipandang sebagai penyebab utama belum optimalnya implementasi Program KangPisMan. Sebaliknya, kepatuhan masyarakat merupakan hasil dari proses implementasi yang dipengaruhi oleh kualitas koordinasi kelembagaan, kepemimpinan pemerintah kewilayahan, intensitas edukasi, ketersediaan sumber daya, serta keberlanjutan

pendampingan kepada masyarakat. Dengan demikian, perubahan perilaku masyarakat merupakan hasil dari proses implementasi kebijakan yang berlangsung secara bertahap, bukan semata-mata ditentukan oleh tingkat kesadaran individu.

Dalam perspektif implementasi kebijakan Grindle, penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi Program KangPisMan merupakan hasil interaksi antara dimensi *content of policy* dan *context of implementation*. Substansi kebijakan yang telah dirancang dengan baik belum secara otomatis menghasilkan implementasi yang efektif apabila tidak didukung oleh kapasitas kelembagaan, koordinasi antaraktor, kepemimpinan lokal, serta partisipasi masyarakat yang berkelanjutan. Sebaliknya, kualitas lingkungan implementasi mampu memperkuat maupun menghambat pencapaian tujuan kebijakan meskipun substansi kebijakannya relatif sama.

Secara keseluruhan, penelitian ini mengindikasikan bahwa penguatan implementasi Program KangPisMan tidak cukup dilakukan melalui penyempurnaan regulasi atau penambahan sarana dan prasarana semata. Upaya yang lebih strategis adalah memperkuat kapasitas kelembagaan pemerintah kewilayahan, meningkatkan kualitas kolaborasi antaraktor, memperluas pemberdayaan masyarakat, serta membangun budaya pengelolaan sampah berbasis sumber secara berkelanjutan. Pendekatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan sekaligus mempercepat terwujudnya pengelolaan sampah perkotaan yang berkelanjutan.

3.4 Implikasi Teoretis

Penelitian ini memberikan beberapa implikasi terhadap pengembangan kajian implementasi kebijakan, khususnya dalam penerapan model implementasi kebijakan Grindle pada konteks pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi Program KangPisMan tidak hanya ditentukan oleh kualitas substansi kebijakan (*content of policy*), tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan implementasi (*context of implementation*). Temuan ini memperkuat pandangan Grindle bahwa efektivitas implementasi kebijakan merupakan hasil interaksi antara isi kebijakan dan konteks implementasi yang saling memengaruhi.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti kapasitas kelembagaan, kepemimpinan pemerintah kewilayahan, koordinasi antarpemangku kepentingan, serta keberlanjutan proses edukasi memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap keberhasilan implementasi dibandingkan keberadaan regulasi semata. Dengan demikian, implementasi kebijakan publik tidak dapat dipahami hanya sebagai proses pelaksanaan aturan, tetapi sebagai proses sosial yang melibatkan interaksi antaraktor, pembelajaran kelembagaan, dan adaptasi terhadap karakteristik masyarakat setempat.

Selain itu, penelitian ini memberikan kontribusi empiris terhadap pengembangan model implementasi kebijakan Grindle dengan menunjukkan bahwa pemerintah kecamatan berperan sebagai *bridging actor* yang menghubungkan kebijakan Pemerintah Kota Bandung dengan pelaksanaan di tingkat kelurahan dan masyarakat. Peran tersebut menjadi penting dalam membangun koordinasi lintas sektor, memperkuat kolaborasi antaraktor, serta memfasilitasi proses pemberdayaan masyarakat. Temuan ini memperluas pemahaman mengenai pentingnya kepemimpinan dan kapasitas kelembagaan pemerintah kewilayahan dalam implementasi kebijakan publik di tingkat lokal.

Kontribusi teoretis lainnya adalah temuan bahwa kepatuhan masyarakat bukan hanya merupakan karakteristik kelompok sasaran, melainkan juga merupakan hasil dari kualitas proses implementasi kebijakan. Kepatuhan masyarakat dipengaruhi oleh intensitas koordinasi, efektivitas komunikasi kebijakan, kualitas pendampingan, serta keberlanjutan proses pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini memperkaya kajian implementasi kebijakan dengan menempatkan perubahan perilaku masyarakat sebagai konsekuensi dari

efektivitas tata kelola implementasi, bukan semata-mata sebagai tanggung jawab individu.

3.5 Implikasi Praktis

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa implikasi praktis yang dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kota Bandung dalam meningkatkan efektivitas implementasi Program KangPisMan.

Pertama, Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Lingkungan Hidup perlu memperkuat kapasitas kelembagaan pemerintah kecamatan dan kelurahan sebagai pelaksana utama implementasi kebijakan di tingkat lokal. Penguatan tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan kompetensi aparatur, penyusunan mekanisme koordinasi lintas sektor yang lebih sistematis, serta penyediaan dukungan teknis bagi pelaksanaan Program KangPisMan.

Kedua, pemerintah perlu meningkatkan keberlanjutan kegiatan edukasi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan perilaku masyarakat memerlukan proses yang berlangsung secara bertahap sehingga kegiatan sosialisasi tidak cukup dilakukan secara insidental. Pendekatan edukasi berbasis komunitas melalui kader PKK, pengelola bank sampah, sekolah, organisasi masyarakat, dan komunitas lingkungan perlu diperluas agar terbentuk budaya pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Ketiga, penyediaan sarana dan prasarana pendukung implementasi kebijakan perlu ditingkatkan secara lebih merata. Ketersediaan tempat sampah terpilah, fasilitas pengolahan sampah, bank sampah aktif, serta dukungan peralatan operasional menjadi faktor yang memengaruhi keberhasilan masyarakat dalam menerapkan prinsip KangPisMan secara konsisten.

Keempat, pemerintah perlu memperkuat sistem monitoring dan evaluasi implementasi Program KangPisMan dengan mengembangkan indikator kinerja yang tidak hanya berorientasi pada jumlah kegiatan atau volume sampah yang berhasil dikurangi, tetapi juga mengukur perubahan perilaku masyarakat, tingkat partisipasi warga, efektivitas koordinasi kelembagaan, serta keberlanjutan program pada tingkat kewilayahan.

Kelima, penelitian ini merekomendasikan pengembangan model tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*) yang melibatkan pemerintah daerah, pemerintah kewilayahan, dunia usaha, perguruan tinggi, komunitas lingkungan, serta masyarakat dalam setiap tahapan implementasi kebijakan. Pendekatan kolaboratif tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas implementasi Program KangPisMan sekaligus memperkuat keberlanjutan pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Kota Bandung.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui Program KangPisMan di Kecamatan Sumur Bandung telah memberikan kontribusi positif dalam mendorong pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui peningkatan kesadaran lingkungan, pembentukan bank sampah, serta tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengurangan, pemilahan, dan pemanfaatan sampah. Dari perspektif implementasi kebijakan Grindle, keberhasilan program tidak hanya dipengaruhi oleh substansi kebijakan (content of policy), tetapi juga oleh kondisi lingkungan implementasi (context of implementation) yang meliputi kapasitas kelembagaan, koordinasi antaraktor, kepemimpinan pemerintah kewilayahan, ketersediaan sumber daya, serta tingkat kepatuhan dan respons masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa substansi Program KangPisMan telah dirancang secara memadai dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Namun demikian, efektivitas implementasi belum sepenuhnya optimal karena masih dihadapkan pada berbagai kendala, antara lain keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pendukung, belum optimalnya koordinasi antarorganisasi pelaksana, serta belum konsistennya perubahan perilaku masyarakat dalam melakukan pengelolaan sampah dari sumbernya. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh kualitas regulasi,

tetapi juga oleh kemampuan pemerintah dalam membangun tata kelola kolaboratif yang mampu memperkuat sinergi antarpemangku kepentingan dan mendorong partisipasi masyarakat secara berkelanjutan.

Kontribusi penelitian ini terletak pada penjelasan empiris bahwa keberhasilan implementasi Program KangPisMan merupakan hasil interaksi antara isi kebijakan dan konteks implementasinya. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah kecamatan berperan sebagai aktor penghubung (bridging actor) yang mengintegrasikan kebijakan pemerintah kota dengan implementasi di tingkat kelurahan dan masyarakat. Selain itu, penelitian ini memperlihatkan bahwa kepatuhan masyarakat bukan semata-mata dipengaruhi oleh tingkat kesadaran individu, tetapi juga merupakan hasil dari kualitas koordinasi kelembagaan, kepemimpinan lokal, intensitas edukasi, dan keberlanjutan proses pendampingan masyarakat.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan agar Pemerintah Kota Bandung memperkuat kapasitas kelembagaan pemerintah kewilayahan, meningkatkan koordinasi lintas sektor, memperluas edukasi dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan, serta mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi implementasi yang tidak hanya berorientasi pada capaian program, tetapi juga pada perubahan perilaku masyarakat. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas implementasi Program KangPisMan sekaligus mendukung terwujudnya tata kelola pengelolaan sampah perkotaan yang berkelanjutan.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kota Bandung, Kecamatan Sumur Bandung, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung, pemerintah kelurahan di wilayah Kecamatan Sumur Bandung, Satgas Citarum Harum, pengelola bank sampah, serta seluruh informan yang telah memberikan waktu, informasi, dan dukungan selama proses pengumpulan data penelitian. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Universitas Langlangbuana atas dukungan akademik yang diberikan sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada para reviewer atas masukan dan saran yang konstruktif untuk penyempurnaan artikel ini.

VI. REFERENSI

Brotosusilo, A., & Nabila, S. H. (2020). Community engagement and waste management policy: A comparative analysis. E3S Web of Conferences, 211, 1–6. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202021101006

Ferronato, N., & Torretta, V. (2019). Waste mismanagement in developing countries: A review of global issues. International Journal of Environmental Research and Public Health, 16(6), 1–28. https://doi.org/10.3390/ijerph16061060

Fitri, R. F., Ati, N. U., & Suyeno. (2019). Implementasi kebijakan pemerintah dalam inovasi pengelolaan sampah terpadu di Taman Tempat Pembuangan Akhir Randegan Kota Mojokerto. Jurnal Respon Publik, 13(4), 12–18.

Hei, K. K., Ong, S. L., & Foo, C. H. (2024). The necessity for end-of-life photovoltaic technology waste management policy: A systematic review. Journal of Cleaner Production, 428, 1–12. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2023.139151

Kaza, S., Yao, L., Bhada-Tata, P., & Van Woerden, F. (2018). What a waste 2.0: A global snapshot of solid waste management to 2050. Washington DC: World Bank Publications.

Maulana, R., Pratama, Y., & Apriyanti, L. (2019). Perencanaan sistem pengurangan sampah permukiman bantaran sungai Cidurian Kota Bandung. Serambi Engineering, 4(4), 664–676.

Mohan, S. V., & Joseph, S. (2021). Waste management policy and circular economy approaches for sustainability. Journal of Cleaner Production, 278, 123–136. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.123136

Putera, P. A. (2016). Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung. Jurnal Administrasi Publik, 6(2), 145–156.

Sabatier, P. A., & Weible, C. M. (2018). Theories of the policy process (4th ed.). New York: Routledge.

Sekarningrum, B., Suparyogi, Y. S., & Yunita, D. (2020). Sosialisasi dan edukasi KangPisMan (Kurangi, Pisahkan dan Manfaatkan sampah) sebagai upaya pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Kota Bandung. Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 3(1), 73–86. https://doi.org/10.24198/kumawula.v3i1.25244

Wilson, D. C., Rodic, L., Modak, P., Soos, R., Carpintero, A., Velis, C., & Simonett, O. (2015). Global waste management outlook. Waste Management & Research, 33(3), 271–272.

Yuanita, P., & Keban, Y. T. (2020). Evaluasi efektivitas program KangPisMan di Kelurahan Sukaluyu dan faktor yang mempengaruhinya. Rekayasa Hijau: Jurnal Teknologi Ramah Lingkungan, 4(2), 93–108. https://doi.org/10.26760/jrh.v4i2

Yulistia, G., Suryaningsih, M., & Rostyaningsih, D. (2018). Implementasi kebijakan pengelolaan sampah Kota Semarang berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah. Journal of Public Policy and Management Review, 7(4), 1–12.